

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN RASIO KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015)

Fathiyah

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

ABSTRACT

This study aims to analyse the efforts made the Government District/Town in Jambi province in an attempt to increase revenue of the original area (PAD) in order to increase the ratio of the independence area for fiscal year 2015.

These studies are qualitative and quantitative by using the related literature and data Report realization of Budget the county or city within Jambi province fiscal year 2015.

Based on the results of the analysis of the obtained conclusions that the ratio of independence County or city within Jambi province are still very small with an overall average of 8.83% just so is need for efforts of local governments to increase the PAD in order to increase the ratio of independence. As for the effort to be made to increase the number of PAD that is by calculating the potential of existing PAD then conducted analysis with micro and macro base it can be done working with related institutions of study so that potential data obtained more accurate PAD. Other efforts is to improve the system of revenue management areas include (1) the expansion of the base of acceptance, (2) control over the revenue leakage, (3) improved the efficiency of the administration of revenue and (4) transparency and accountability.

Key word: the original Revenue area, the ratio of Self-sufficiency, the report realization of Budget

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentunya Pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana dan target pembangunan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar dari APBD dan sumber dana yang dibutuhkan tersebut dianggarkan dalam bentuk sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Selama ini besaran dana yang bersumber dari PAD sangat kecil sekali jumlahnya terutama untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yaitu hanya kisaran dibawah 26 persen saja dari total Pendapatan daerah bahkan ada yang dibawah 10 persennya, dengan jumlah PAD yang dibawah 23 persen atau tingkat rasio kemandirian daerah hanya sebesar 23 persen saja

tentunya tidak mencukupi bagi Kabupaten/Kota dalam membiayai program dan kegiatannya hal ini bisa terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Tingkat Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2015 (dalam 000)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)
Kota Jambi	263.925.520,2	1.115.296.732,7	23,66
Kota Sungai Penuh	36.246.931,8	572.296.754,2	6
Kabupaten Kerinci	70.462.409,6	887.107.913,9	7,94
Kabupaten Sarolangun	63.623.790,9	997.258.616,0	6
Kabupaten Merangin	76.949.402,9	1.064.467.262,4	7,13
Kabupaten Bungo	105.277.046,3	947.107.059,9	11,1
Kabupaten Tebo	62.037.299,5	654.487.852,5	9
Kabupaten Tanjabbar	68.040.011,8	858.102.488,8	7,93
Kabupaten Tanjabtim	38.473.606,9	877.011.368,8	4,38
Kabupaten Batanghari	68.925.708,0	846.430.746,2	8
Kabupaten Ma. Jambi	63.623.790,9	997.258.616,0	6
Rata-Rata Rasio			8,83

Sumber : Rekapitulasi LRA Kabupaten/Kota TA. 2015

Dari tabel terlihat bahwa rasio kemandirian daerah seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sangat kecil sekali dan daerah dianggap masih belum mandiri dalam membiayai pembangunannya serta mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pusat. Hal ini bisa dilihat pada rasio kemandiriannya seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebesar antara 4 – 23 % saja dengan rata-rata keseluruhan sebesar 8,83%.

Kecilnya persentase Rasio kemandirian ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah

keterbatasan pemerintah daerah dalam menghitung potensi riil PAD yang sudah ada dan masih banyak lagi sumber-sumber PAD yang belum tergali serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota selama ini., sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan PAD sehingga meningkatkan rasio kemandirian seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Merujuk pada uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya dan analisis yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian daerah

dengan Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimana analisis dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 ?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015.

1.3. Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang Sah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah. (Renowijoyo, 2010)

Keuangan daerah yang tercermin dalam APBD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebagai sumber pembiayaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. (Perda Pertanggungjawaban APBD, 2016)

Tahun Anggaran 2015.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya ada hanya belum didapat di tangan dan untuk memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas dan banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenal potensi pendapatan. Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lainnya berbeda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda (Mahmudi, 2010)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah yang berasal dari PAD adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak daerah
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan

4. Lain-Lain PAD yang sah

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Oleh karena itu untuk meningkatkan PAD dibutuhkan

manajemen pendapatan disetiap daerah agar dapat memahami potensi

pendapatan yang ada di daerahnya. Manajemen Pendapatan menurut Mahmudi (2010) meliputi 5 tahapan yaitu :

1. Identifikasi sumber pendapatan
2. Administrasi pendapatan
3. Koleksi Pendapatan
4. Pencatatan (akuntansi) pendapatan
5. Alokasi Pendapatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan literatur yang ada dan data Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.

III. PEMBAHASAN

2.1. Analisis dan upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan menghitung Potensi dengan menggunakan basis mikro dan makro serta perlu adanya perbaikan dalam manajemen pendapatan.

Penghitungan potensi pendapatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu (1) Basis makro, dan (2) Basis mikro. Penghitungan pendapatan dengan basis makro dilakukan dengan teknik estimasi dengan model regresi ekonometrik yang menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi, sedangkan penghitungan basis mikro dilakukan dengan cara survey terhadap objek dan subjek pajak

Data yang tersedia kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan literatur yang terkait.

kemudian dilakukan penghitungan (assessment) potensi pendapatan yang ada.

Selama ini perhitungan potensi PAD yang ada cenderung pada basis mikro dan hanya berdasarkan persentase kenaikan saja misalnya untuk potensi tahun ini besarnya dihitung dengan menaikkan anggaran 10 persen dari tahun sebelumnya berarti potensi PAD tahun ini adalah sebesar 110 persen, bahkan kadang-kadang perhitungan potensi tahun ini tidak berbeda jauh dengan potensi tahun lalu. Memang tidak semua dilakukan perhitungan seperti tersebut diatas tetapi ada beberapa jenis PAD yang penghitungan potensinya seperti itu terutama untuk PAD yang bukan menjadi andalan dan nilai realisasinya setiap tahun sangat kecil sekali.

Menggali potensi PAD dari pajak dan retribusi ini dilakukan dengan cara yang intensif sekali seperti melakukan survey ke lapangan dengan menggandeng pusat-pusat kajian dari

perguruan tinggi atau swasta, disamping itu khusus untuk pajak pemerintah bisa membuat regulasi dan kebijakan agar masyarakat mau membayar pajak, karena pajak sifatnya adalah wajib maka Pemerintah daerah bisa memaksa masyarakat untuk membayar dan jika tidak akan dikenakan denda atau sanksi, dengan demikian penerimaan PAD dari sektor pajak daerah akan dapat ditingkatkan, apalagi jika pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan tiap tahun otomatis akan ikut berperan dalam meningkatkan jumlah pendapatan dari pajak daerah.

Berkaitan dengan peningkatan retribusi, biasanya tidak pernah jauh dari pelayanan dan sarana atau fasilitas yang disediakan. Selama ini ada kesan petugas wajib memungut retribusi tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat juga kurang tertarik untuk menggunakan sarana tersebut dan petugas yang memungut juga terkesan tidak ramah dan tidak peduli bahkan kadang-kadang juga ada pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, maka kedepannya agar penerimaan dari retribusi meningkat tentunya harus ada peningkatan pelayanan serta sarana atau fasilitas yang juga mendukung.

Dalam hal perhitungan potensi dengan pendekatan basis makro Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pusat kajian ekonomi pada perguruan tinggi, teknik perhitungan yang digunakan dengan metode kuantitatif mulai dari simple *smoothing technique* hingga regresi yang canggih. Umumnya teknik kuantitatif memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan kualitatif. Dalam penggunaan teknik kuantitatif ini sebelum dilakukan perkiraan terlebih dahulu harus

ditentukan subjek perkiraan, rentang perkiraan dan data yang digunakan sehingga dalam penghitungannya nanti akan cukup tinggi keakuratannya.

Selanjutnya yang harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menggali dan menghitung potensi PAD adalah perlu adanya pembenahan dalam manajemen penerimaan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi fiskal daerah. Berhasil tidaknya pemerintah dalam memperoleh pendapatan sangat dipengaruhi oleh manajemen pendapatan yang digunakan. Ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah yaitu (1) perluasan basis penerimaan, (2) pengendalian atas kebocoran pendapatan, (3) peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dan (4) transparansi serta akuntabilitas.

Perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan dengan cara sebagai berikut (1) Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjangkau wajib pajak/retribusi baru, (2) Mengevaluasi tarif pajak/retribusi, (3) Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi, (4) melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi.

Pengendalian atas kebocoran dapat dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian dengan beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu (1) melakukan audit baik rutin maupun insidental, (2) memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, (3) memberikan penghargaan yang memadai untuk masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) bagi yang tidak mematuhi, serta (4) meningkatkan disiplin serta moralitas

pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.

Peningkatan efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja penerimaan, hal ini dapat dilakukan dengan cara (1) memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga menjadi lebih mudah dan sederhana, (2) mengurangi biaya pemungutan pendapatan, (3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan pihak ketiga dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Aspek Transparansi dan akuntabilitas akan mengakibatkan pengendalian dan manajemen pendapatan daerah menjadi akan semakin baik, namun aspek ini membutuhkan beberapa persyaratan diantaranya (1) adanya dukungan teknologi informasi (TI) dalam membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah, (2) adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dan (3) tidak adanya korupsi sistemik dilingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam upaya meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu dengan menghitung potensi pendapatan dengan basis mikro

dan makro serta dengan memperbaiki manajemen pendapatan daerah.

2. Perhitungan dengan menggunakan basis mikro yaitu dilakukan dengan cara survey terhadap objek dan subjek pajak kemudian dilakukan penghitungan (assessment) potensi pendapatan yang ada, sedangkan dengan basis makro yaitu dengan menggadeng pusat kajian baik swasta maupun perguruan tinggi dengan teknik perhitungan yang digunakan adalah metode kuantitatif mulai dari simple *smoothing technique* hingga regresi yang canggih sehingga menghasilkan hasil perhitungan yang cukup tinggi.

3. Perbaikan dalam manajemen pendapatan dapat dilakukan dengan (1) perluasan basis penerimaan, (2) pengendalian atas kebocoran pendapatan, (3) peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dan (4) transparansi serta akuntabilitas.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun mendatang agar meningkatkan sumber pendapatan dengan cara menghitung potensi yang ada terlebih dahulu, perhitungan potensi akan membantu daerah meningkatkan pendapatan daerahnya.

2. Pembinaan pada manajemen pendapatan daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Renyowijoyo, Muindro, 2010, *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba* : Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta

Pemerintah Provinsi Jambi, 2016,
*Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2015,*
Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi, 2016,
*Rekapitulasi Laporan
Realisasi Anggaran
Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Jambi TA. 2015 ,* Jambi

Republik Indonesia, 2004, *Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah
Daerah, Republik Indonesia,*
Jakarta

Republik Indonesia, 2004, *Undang-
undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang
Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah,*
Republik Indonesia, Jakarta

Republik Indonesia, 2014, *Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah
Daerah, Republik Indonesia,*
Jakarta